

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LANSKAP WISATA RELIGI BANTEN LAMA BERBASIS *ISLAMIC-FRIENDLY TOURISM*

Buruuj Ahwaludin¹, Hadi Susilo Arifin^{1*}, Irman Firmansyah², Nurhayati¹

¹ Program Studi Magister Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, IPB University, Dramaga, Bogor, 16680, Indonesia

² System Dynamics Center, IPB University, Alumni Building, Fl 1 - R105, Baranangsiang, Kota Bogor, 16129, Indonesia

*Email: hsarifin@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Kawasan wisata religi Banten Lama saat ini menghadapi ancaman degradasi kualitas lanskap yang signifikan. Hal ini terjadi akibat kegagalan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian ruang dan kuatnya intrusi aktivitas ekonomi informal pada area inti kawasan. Kondisi ini merupakan masalah sistemik, yang jika dibiarkan akan mengancam keberlanjutan kawasan sebagai cagar budaya dan wisata religi. Penelitian ini bertujuan merumuskan model kebijakan pengelolaan lanskap berbasis *Islamic-Friendly Tourism* (IFT) sebagai pendekatan strategis untuk mengakselerasi peningkatan kualitas lanskap wisata menuju standar performa yang optimal dan berkelanjutan. Menggunakan metode *Interpretative Structural Modeling* (ISM), penelitian ini memetakan hubungan struktural antara 15 elemen kebijakan strategis berdasarkan karakteristik daya dorong (*driving power*) dan ketergantungannya (*dependence*). Hasil analisis menunjukkan bahwa internalisasi nilai spiritual dan implementasi sistem sanitasi terstandar merupakan variabel penggerak kunci (*driving factors*). Kedua elemen ini menjadi fondasi mutlak bagi efektivitas penataan zonasi dan intervensi fisik di level kebijakan yang lebih tinggi. Model hierarki tujuh level yang dihasilkan kemudian ditransformasikan menjadi peta jalan kebijakan empat tahap untuk mengatasi stagnasi tata kelola yang selama ini terjadi. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai teologis ke dalam kerangka manajerial fisik merupakan jalur kebijakan paling *viable* dan berkelanjutan bagi pelestarian kawasan warisan peradaban Islam di Indonesia.

Kata kunci: Banten Lama, *Islamic-Friendly Tourism*, ISM, Kebijakan Lanskap, Wisata Religi.

LANDSCAPE MANAGEMENT POLICY FOR THE BANTEN LAMA RELIGIOUS TOURISM AREA BASED ON ISLAMIC-FRIENDLY TOURISM

ABSTRACT

Banten Lama religious tourism area currently facing a significant threat of landscape quality degradation. This stems from a failure in cross-sectoral coordination regarding spatial control and the intensive intrusion of informal economic activities within the core zone. This systemic issue, if left unaddressed, threatens the long-term sustainability of the site as both a cultural heritage and a religious tourism destination. This research aims to formulate a landscape management policy model based on Islamic-Friendly Tourism (IFT) as a strategic approach to accelerate landscape quality improvement toward optimal and sustainable performance standards. Utilizing the Interpretative Structural Modeling (ISM) method, the study maps the structural relationships between 15 strategic policy elements based on their driving power and dependence characteristics. Analysis results reveal that the internalization of spiritual values and the implementation of standardized sanitation systems are the key driving factors. These two elements serve as the absolute foundation for effective zoning and physical intervention at higher policy levels. The resulting seven-level hierarchical model is then transformed into a four-stage policy roadmap to overcome long-standing governance stagnation. These findings underscore that integrating theological values into physical managerial frameworks is the most viable and sustainable policy pathway for the preservation of Islamic civilization heritage areas in Indonesia.

Keywords: Banten Lama, *Islamic-Friendly Tourism*, ISM, Landscape Policy, Religious Tourism.

PERNYATAAN KUNCI

- Konflik pemanfaatan ruang di Kawasan Banten Lama bukan sekadar permasalahan teknis, melainkan manifestasi dari lemahnya struktur pengendalian kebijakan. Hal ini memicu degradasi kualitas visual lanskap secara masif dan menurunkan citra kawasan sebagai objek wisata religi.
- Internalisasi nilai spiritual serta penerapan sistem kebersihan terpadu berbasis kolaborasi komunitas merupakan faktor penggerak utama. Keberhasilan keseluruhan sistem pengelolaan bergantung pada aktivasi elemen ini di level hulu untuk membentuk perilaku pro-lingkungan yang berkelanjutan.
- Penataan zonasi ruang yang ideal serta alokasi anggaran yang spesifik untuk keamanan di area rawan dan kenyamanan di jalur sirkulasi merupakan luaran kebijakan (*policy outcomes*). Secara struktural, efektivitas intervensi fisik dan finansial ini sangat bergantung pada keberhasilan penguatan fondasi nilai dan sistem manajemen dasar.
- Investasi kebijakan jangka pendek melalui penguatan kapasitas komunitas diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan jangka panjang dan memitigasi risiko kegagalan manajemen di masa depan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Transformasi pengelolaan Kawasan Banten Lama perlu ditempuh melalui pendekatan kebijakan yang berjenjang dan saling terhubung sebagaimana ditunjukkan oleh struktur hierarki hasil analisis *Interpretative Structural Modeling* (ISM). Tahap awal intervensi harus difokuskan pada penguatan faktor pengungkit dasar, khususnya internalisasi nilai-nilai spiritual bagi pengelola maupun pengunjung. Hal ini diimplementasikan melalui program edukasi publik dan penerapan sistem kebersihan terpadu melalui kolaborasi komunitas lokal sebagai garda depan pengawasan kawasan.

Pada tahap berikutnya, intervensi fisik diarahkan pada revitalisasi infrastruktur dan pengembangan jalur sirkulasi tematik yang mengarahkan alur berwisata secara tertib. Selain itu, rekayasa zonasi ruang harus dilakukan untuk memisahkan jalur pengunjung (*peziarah*) dari aktivitas komersial guna menjaga ketertiban aktivitas ziarah/wisata Selanjutnya, pengelola

kawasan perlu memfungsikan rencana pengelolaan tidak semata sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen kebijakan operasional melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan penyediaan fasilitas yang mendukung kenyamanan pengunjung.

Kebijakan ini harus menyeimbangkan penegakan aturan yang tegas dengan pendekatan edukatif guna menjaga kepercayaan pengunjung serta keberlanjutan fungsi kawasan sebagai objek wisata religi. Sebagai luaran akhir, alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk menjamin keamanan pada area rawan serta kenyamanan pada jalur sirkulasi utama guna mewujudkan tata ruang ideal yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kawasan Banten Lama di Kota Serang merupakan pusat peradaban Islam termahsyur di Nusantara pada abad ke-16 hingga awal abad ke-19. Sebagai kompleks cagar budaya peninggalan Kesultanan Banten, kawasan ini mencakup berbagai situs monumental seperti Istana Surosoan, Masjid Agung Banten, Situs Istana Kaibon, Benteng Speelwijk, dan Danau Tasikardi. Keberadaan situs-situs ini tidak hanya mencerminkan warisan fisik, tetapi juga fenomenologi keagamaan yang hidup melalui tradisi ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin dan para tokoh penyebar Islam lainnya (Suweko dan Kridarso 2018). Karakter sakral ini menjadikan Banten Lama sebagai destinasi wisata religi utama yang merefleksikan nilai-nilai spiritual dan identitas budaya lokal. Secara formal, pemerintah telah berupaya melindungi aset ini melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 437/Kep.160-Huk/2018 tentang Penetapan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Banten (Banten Lama).

Keberadaan payung hukum tersebut belum cukup kuat untuk membendung tantangan degradasi fungsi religius dan historis kawasan. Terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi zonasi yang ditetapkan dengan realitas di lapangan. Lemahnya mekanisme pengawasan dan belum adanya aturan turunan yang bersifat operasional menyebabkan pengendalian struktural terhadap aktivitas ekonomi di zona inti gagal dilakukan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang memicu degradasi kualitas visual serta mereduksi kesakralan atmosfer religius. Intrusi aktivitas komersial informal yang tidak tertata

mengaburkan karakter arsitektur sejarah dan mengganggu kekhusyukan peziarah dalam menjalankan ibadah. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan fasilitas sanitasi yang belum memenuhi standar kenyamanan dan prinsip thaharah, yang berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan (*trust*) pengunjung terhadap pengelolaan kawasan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kualitas pengalaman spiritual peziarah sangat ditentukan oleh kemurnian atmosfer ruang sakral; gangguan visual, ketidakteraturan sirkulasi, dan rendahnya kebersihan lingkungan berkontribusi signifikan terhadap penurunan persepsi nilai destinasi (Wahyuni *et al.* 2023; Rindasih *et al.* 2022; Rahmafritria *et al.* 2024a). Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi optimasi pengelolaan lanskap yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek non-fisik yang mendukung keberlanjutan sebuah lanskap budaya (Hasibuan *et al.* 2014; Hapsari *et al.* 2025), terlebih keberadaan lanskap cagar budaya.

Dalam konteks pariwisata global, terjadi peningkatan permintaan pariwisata yang mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah atau *Islamic-Friendly Tourism* (IFT) (Battour dan Ismail 2016). IFT merupakan integrasi antara

atribut fisik ramah Muslim dengan ekspresi nilai budaya Islam untuk membangun pengalaman wisata yang bermartabat (Primadona *et al.* 2025). Selama ini, upaya revitalisasi Banten Lama cenderung bersifat parsial dan terlalu berfokus pada dimensi fisik arsitektural. Kegagalan pengelolaan sering kali disebabkan oleh pengabaian terhadap dimensi manusiawi dan nilai dasar manajerial (Mubasyaroh *et al.* 2024). Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pengarusutamaan nilai spiritual sebagai fondasi kebijakan strategis. Kajian ini bertujuan merumuskan model kebijakan pengelolaan lanskap wisata religi Banten Lama berbasis IFT. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan Banten Lama sebagai destinasi wisata religi nasional yang berkualitas (Pusparini *et al.* 2017). Melalui metode ISM, penelitian mengidentifikasi variabel pengungkit kunci (*key leverage factors*) untuk mentransformasi sistem pengelolaan dari akar masalahnya. Model yang dihasilkan berfungsi sebagai peta jalan kebijakan (*policy roadmap*). Model ini mengedepankan harmonisasi antara dimensi fisik dan non-fisik guna melestarikan nilai-nilai lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan kawasan (Arifin *et al.* 2009; Ilmi *et al.* 2022; Rahmafritria *et al.* 2024b).



Gambar 1. Fasilitas Sanitasi (a) Masjid agung, (b) Tasikardi, (c) Speelwijk

SITUASI TERKINI

Kawasan Banten Lama mencakup area seluas 926,94 ha yang secara geografis berada pada dataran aluvial pesisir utara Provinsi

Banten. Kawasan ini merupakan lanskap sejarah dinamis yang merupakan pusat peradaban islam sejak abad 16-18 M (Pasaribu 2019). Banten Lama menaungi sejumlah situs utama warisan budaya dan religi, antara lain Masjid Agung

Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Speelwijk, serta Danau Tasikardi. Secara ekologis, kawasan ini menghadapi tekanan masif akibat perubahan status Serang menjadi ibukota provinsi dan kota otonom yang memicu percepatan alih fungsi lahan (Lamidi *et al.* 2018). Fenomena urbanisasi ini menyebabkan situs-situs bersejarah bersinggungan langsung dengan pemukiman padat dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak terorganisir. Akibatnya, terjadi penurunan citra kawasan karena fungsi pelestarian sering kali kalah bersaing dengan kebutuhan ruang publik dan ekonomi harian warga (Lamidi *et al.* 2018; *ILmi*).

Observasi lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas infrastruktur di Kawasan Banten Lama belum diikuti oleh standar kualitas dan keterawatan yang seragam. Terdapat ketimpangan signifikan dalam distribusi fasilitas penunjang di berbagai titik utama. Fasilitas kebersihan dan sanitasi dengan kondisi yang cukup memadai hanya ditemukan di Masjid Agung, sementara situs lain seperti Speelwijk memiliki ketersediaan yang tidak merata, bahkan Tasikardi berada pada kondisi kritis dengan sarana yang tidak terawat (Gambar 1). Permasalahan sanitasi menjadi catatan vital karena belum sepenuhnya memenuhi prinsip *thabarah* yang menjadi standar kenyamanan wisatawan religi.

Jalur sirkulasi dan aksesibilitas meskipun secara umum dinilai baik, penerapan desain

inklusif (*universal design*) masih sangat terbatas. Jalur bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas hanya diperhatikan secara fungsional di Masjid Agung dan Surosowan, sedangkan situs sejarah lainnya belum menyediakan aksesibilitas yang memadai. Selanjutnya kekurangan pada elemen penanda dan informasi (*signage*) yang informatif merupakan masalah sistemik yang menghambat pengalaman pengunjung. Minimnya petunjuk arah dan papan interpretasi edukatif menyebabkan pengunjung kehilangan orientasi ruang dan makna filosofis dari situs-situs bersejarah tersebut.

Permasalahan kawasan yang paling menonjol berkaitan dengan lemahnya kontrol terhadap aktivitas ekonomi di zona inti kawasan (Gambar 2). Intrusi Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang tidak terorganisir telah memicu polusi visual dan mengganggu alur pergerakan peziarah. Penumpukan limbah padat di jalur sirkulasi utama serta area parkir mencerminkan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menegakkan sistem kebersihan terpadu. Ketidakteraturan ini menyebabkan batas antara ruang sakral (ibadah dan ziarah) dan ruang profan (aktivitas ekonomi) menjadi semakin kabur, yang jika tidak segera ditangani melalui intervensi kebijakan terstruktur, dapat menurunkan daya dukung lingkungan serta nilai historis kawasan secara permanen.



Gambar 2. Aktivitas ekonomi pada area inti situs (a) Tasikardi (b) Masjid agung (c) Surosowan.

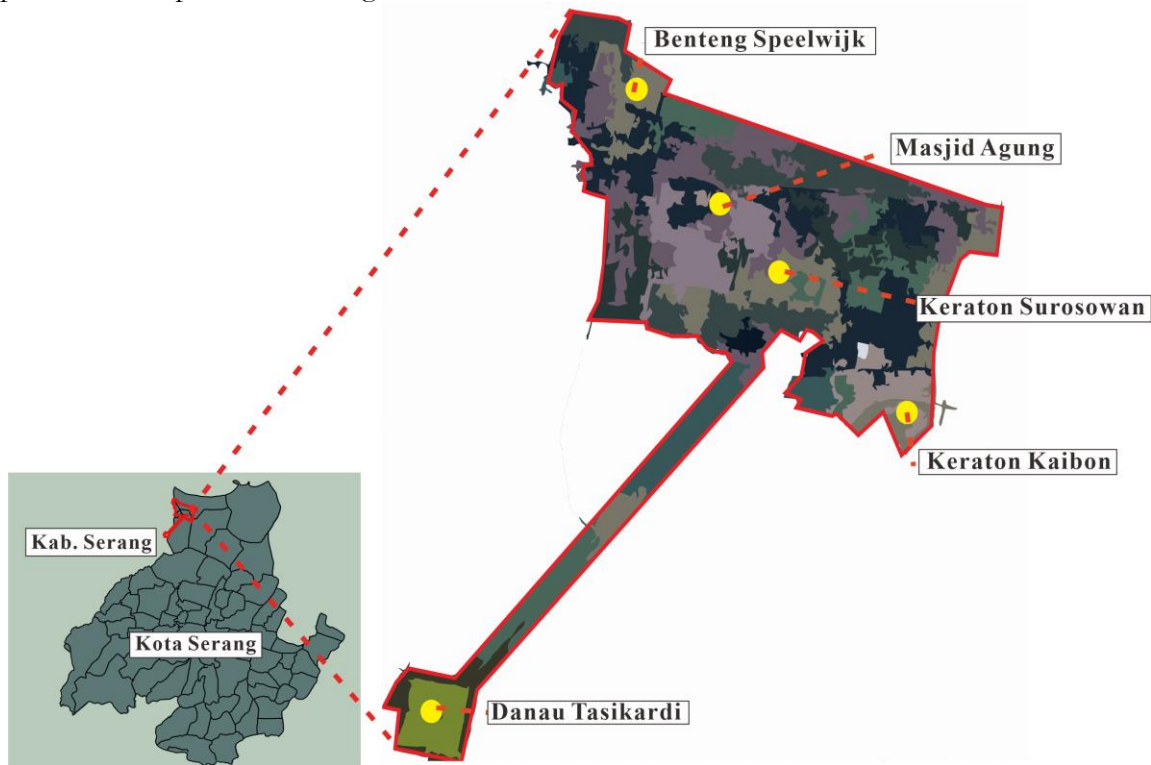
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Banten Lama yang merupakan wilayah Kota

Serang dan sebagian Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kajian difokuskan pada zona inti peninggalan Kesultanan Banten yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya

berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 437/Kep.160-Huk/2018. Area studi mencakup lima situs utama yang merepresentasikan poros kosmologis kota Islam

Banten Lama, yaitu Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Speelwijk, dan Danau Tasikardi (Gambar 3).



Gambar 3. Lokasi Penelitian

Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan selama enam bulan, mulai Juni hingga November 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-method* sebagai dasar untuk memahami konteks pengelolaan lanskap wisata religi berbasis IFT. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi fisik dan pola pemanfaatan ruang, studi literatur untuk memperkuat kerangka konseptual dan kebijakan, serta wawancara mendalam guna menggali persepsi dan pengetahuan pemangku kepentingan terkait isu pengelolaan kawasan. Data kualitatif yang dihimpun pada tahap ini berfungsi sebagai landasan sintesis isu strategis.

Pemilihan responden dilakukan secara purposive dengan mengacu pada kerangka *pentabelix*. Kerangka ini merupakan sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media. sinergi ini bertujuan menciptakan keselarasan kebijakan serta menjamin pengelolaan kawasan Banten Lama yang inklusif dan berkelanjutan (Pribadi dan setiawan 2024). Daftar responden *pentabelix* disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar responden kunci

| Kategori | Jabatan |
|--------------|--|
| Akademisi | Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, FE, UNTIRTA. |
| Pelaku usaha | Ketua UMKM Kota Serang, Banten |
| Komunitas | Ketua POKDARWIS Maulana Yusuf, Banten Lama. |
| Pemerintah | Kepala Bidang Pariwisata Disparpora Kota Serang, Banten. |
| Media | Jurnalis Lokal, Owner media InfoSerang. |

Data hasil sintesis isu strategis selanjutnya dianalisis menggunakan metode ISM untuk menyusun model pengelolaan lanskap kawasan dengan menentukan faktor penggerak (*driving factors*) dalam skenario kebijakan (Casnan *et al.* 2021). ISM merupakan salah satu teknik pemodelan sistem untuk perencanaan jangka panjang (Paulus *et al.* 2022). Tahapan analisis ISM meliputi: (1) identifikasi elemen kebijakan strategis yang relevan dengan pengelolaan lanskap wisata religi, (2) penilaian hubungan kontekstual antar elemen melalui pendapat pakar, (3) penyusunan *Structural Self-Interaction*

Matrix (SSIM), (4) pengembangan *reachability matrix*, dan (5) pembentukan struktur hierarki model pengelolaan lanskap (Marimin 2004). Model hierarki yang dihasilkan digunakan sebagai dasar perumusan peta jalan kebijakan (*policy roadmap*) pengelolaan kawasan Banten Lama berbasis IFT. Strategi prioritas kebijakan dapat dilihat sebagai alternatif masukan dalam kebijakan dan rencana strategis pariwisata (*strategic tourism plan*) (Ilhami *et al.* 2024).

ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/ PENANGANAN

Sintesis kebijakan pengelolaan kawasan banten lama dilakukan melalui pendekatan *Interpretative Structural Modelling* (ISM) untuk

mengungkap struktur hubungan antar elemen strategis dalam sistem pengelolaan lanskap wisata religi. Perumusan strategi kebijakan pengelolaan lanskap didasarkan pada tiga pilar utama keberlanjutan, yaitu aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, guna menciptakan kawasan inklusif yang mampu berfungsi secara fungsional dan berkelanjutan (Al Ayyubi *et al.* 2024). Analisis difokuskan pada identifikasi faktor penggerak utama (*driving factors*), pola ketergantungan antar variabel, serta implikasinya terhadap perumusan peta jalan kebijakan yang berjenjang dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan perumusan alternatif solusi yang tidak bersifat parsial, melainkan mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan fisik kawasan secara sistemik.

Tabel 2. Identifikasi elemen strategi

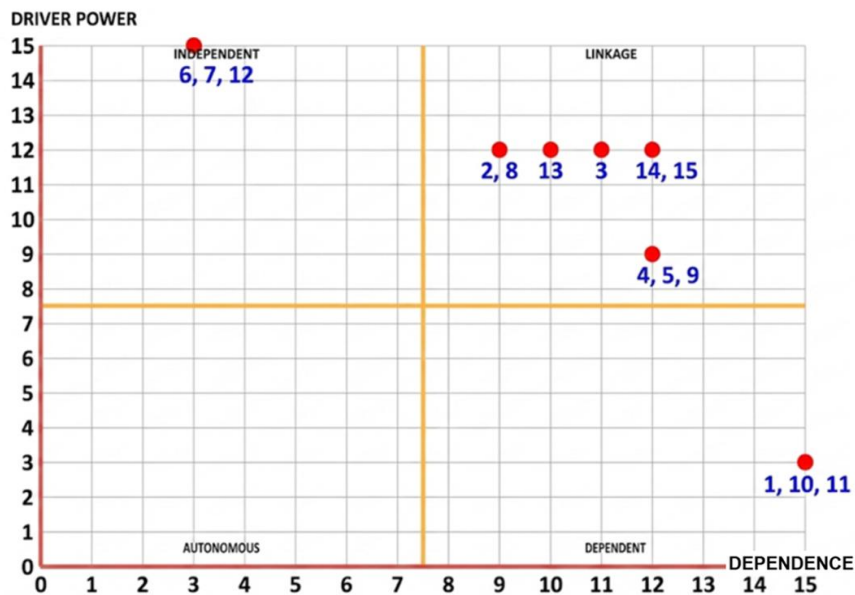
| Kode | Deskripsi Strategi |
|---------------------------|---|
| E1 | Optimalisasi rencana pengelolaan melalui penataan zonasi ruang untuk meningkatkan efektivitas aksesibilitas dan keamanan kawasan. |
| E2 | Sinkronisasi identitas nilai lokal dalam desain lanskap dan sistem pencahayaan untuk menjamin kenyamanan psikologis dan fisik pengunjung. |
| E3 | Pengembangan jalur sirkulasi tematik berbasis narasi sejarah dan budaya untuk mengatur alur wisata yang tertib dan bermakna. |
| E4 | Penguatan penegakan regulasi rencana pengelolaan guna menjamin ketertiban fungsional kawasan. |
| E5 | Membangun etika kebersihan melalui penguatan norma sosial, edukasi publik, dan sistem pengawasan terpadu. |
| E6 | Internalisasi nilai spiritual untuk meningkatkan ketertiban dan kesadaran kebersihan melalui interpretasi lapangan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib kawasan. |
| E7 | Aktivasi atraksi budaya sebagai media sosialisasi nilai-nilai pelestarian lingkungan dan ketertiban umum. |
| E8 | Peningkatan sistem keamanan melalui revitalisasi fasilitas dan zonasi. |
| E9 | Evaluasi dan <i>redesign</i> lanskap berbasis daya dukung lingkungan dan peningkatan aksesibilitas universal. |
| E10 | Prioritas alokasi anggaran untuk penguatan sistem keamanan pada koridor sirkulasi dan area rawan. |
| E11 | Peningkatan kapasitas dan standar higienitas fasilitas sanitasi untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan publik. |
| Kode | Deskripsi Strategi |
| E12 | Menerapkan sistem kebersihan terpadu dengan jadwal rutin dan pelibatan komunitas lokal. |
| E13 | Melakukan evaluasi rutin dan penataan ulang area rawan melalui penguatan marka, informasi publik, dan supervisi lapangan. |
| E14 | Pengelolaan anggaran dengan pendekatan transparansi edukatif dan kolaboratif. |
| E15 | Desain alur fasilitas sanitasi yang responsif terhadap privasi dan norma sosial untuk mencegah kepadatan pengunjung. |
| Keterangan: | |
| E: Elemen Strategi (1-15) | |

Elemen strategi dalam penelitian ini dikonstruksi melalui hasil wawancara mendalam

dan sintesis aspirasi pemangku kepentingan yang merepresentasikan unsur *pentabelix* (pemerintah,

akademisi, pelaku bisnis, komunitas/masyarakat, dan media). Pelibatan berbagai pihak ini krusial karena peran pemerintah sebagai pemegang regulasi utama memerlukan dukungan dari akademisi dalam hal inovasi dan riset (Septian *et al.* 2025). Selain itu, keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar regulasi dapat berjalan sesuai dengan karakter daerah serta pengetahuan lokal yang ada. Pelibatan kelima pilar ini menjamin bahwa elemen strategi yang dirumuskan (Tabel 2) telah mencakup aspek legal-formal, kelayakan saintifik, keberlanjutan ekonomi, kearifan lokal, serta keterbukaan informasi publik.

Analisis kuadran memetakan posisi setiap elemen strategi ke dalam empat kuadran berdasarkan kekuatan daya dorong (*driving power*) dan ketergantungannya (*dependence power*). Pemetaan elemen kebijakan ke dalam diagram kartesius menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lanskap banten lama merupakan sistem yang terintegrasi penuh, ditandai dengan tidak ditemukannya variabel otonom (Gambar 5). Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh elemen memiliki relevansi tinggi dan saling berinteraksi.



Gambar 5. Matriks elemen strategi

Struktur Sistem Pengelolaan Berdasarkan Analisis kuadran

Pemetaan elemen kebijakan ke dalam diagram Kartesius kuadran menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lanskap Banten Lama merupakan sistem yang terintegrasi penuh, ditandai dengan tidak ditemukannya variabel otonom (Kuadran I). Temuan ini mengindikasikan bahwa seluruh elemen strategi yang dirumuskan memiliki tingkat relevansi yang tinggi serta saling berinteraksi dalam menentukan kinerja pengelolaan kawasan. Dengan demikian, kegagalan atau keberhasilan satu elemen akan berdampak langsung terhadap elemen lainnya dalam struktur sistem.

Pada sektor *independent* (Kuadran IV), teridentifikasi tiga variabel kunci dengan daya dorong tertinggi, yaitu Internalisasi Etika Pengunjung (E6), Aktivasi Atraksi Budaya (E7),

dan Sistem Kebersihan Partisipatif (E12). Dalam perspektif kebijakan, posisi elemen berada di kuadran IV menunjukkan bahwa ketiganya berperan sebagai penggerak. Hal ini menegaskan bahwa tanpa penguatan dimensi perilaku, nilai, dan kesadaran kolektif masyarakat, intervensi fisik dan regulatif cenderung tidak memiliki daya tahan jangka panjang (Mubasyaroh *et al.* 2024).

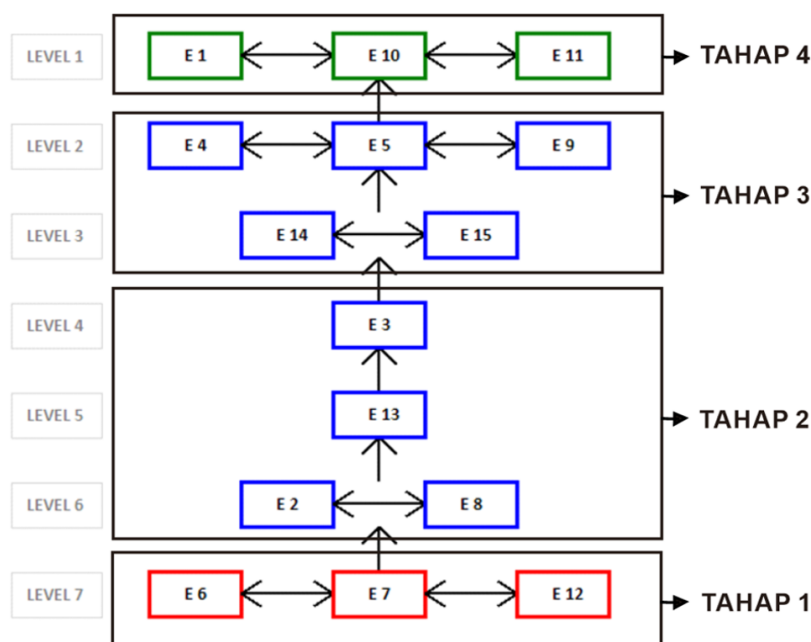
Sektor *linkage* (Kuadran III) menampung elemen yang sangat sensitif seperti Manajemen, Sirkulasi Tematik (E3), Revitalisasi Infrastruktur (E8), dan Akuntabilitas Anggaran (E14). Elemen-elemen ini sangat sensitif; perubahan kecil pada faktor penguat (E6, E7, E12) akan memberikan dampak besar pada elemen-elemen di kuadran ini. Kegagalan di sektor ini berpotensi memutus rantai transmisi nilai spiritual ke dalam bentuk perilaku nyata di lapangan.

Sementara itu, sektor *dependent* (Kuadran II) diisi oleh elemen-elemen yang merepresentasikan hasil akhir sistem pengelolaan, terutama Zonasi Ruang (E1), Penataan Aktivitas Ekonomi (E10), dan Standar Higienitas Fasilitas (E11). Hal ini membuktikan secara ilmiah bahwa kesemrawutan PKL dan konflik ruang adalah gejala, bukan akar masalah. Penyelesaiannya bergantung sepenuhnya pada keberhasilan tahap edukasi dan sistem manajemen di level dasar. Penataan kawasan yang efektif sebaiknya menerapkan

rancangan zona (seperti *block plan*) untuk memisahkan aktivitas utama dengan aktivitas pendukung agar tidak saling mengganggu (Azikin dan Fewidarto 2023).

Model Hierarki dan Alternatif Solusi Berjenjang

Berdasarkan analisis partisi level ISM, disusun sebuah model struktural tujuh level yang kemudian dirumuskan ke dalam empat tahapan implementasi kebijakan sebagai alternatif solusi pengelolaan kawasan (Gambar 6).



Gambar 6. Struktur elemen strategi.

Tahap 1 - Penguatan Fondasi Nilai (Level 7): Fokus pada aspek intangible (E6, E7, E12). Kebijakan pada tahap awal diprioritaskan pada aspek intangible melalui internalisasi nilai religi (E6) dan pembentukan sistem kebersihan berbasis komunitas (E12). Ini merupakan fase krusial untuk menanamkan memori kolektif dan norma sosial yang mendukung pelestarian lingkungan (Sarbini *et al.* 2025).

Tahap 2 - Transisi Nilai ke Infrastruktur (Level 4–6): Penerjemahan nilai lokal ke dalam elemen fisik dilakukan melalui desain lanskap yang mencerminkan identitas kawasan (E2) dan pengembangan jalur sirkulasi edukatif (E3). Tahap ini berperan sebagai jembatan antara dimensi nilai dan tata ruang.

Tahap 3 - Implementasi Tata Tertib Operasional (Level 2-3): Fokus pada penguatan tata kelola kolaboratif, transparansi anggaran

(E14), dan penyediaan fasilitas yang responsif terhadap privasi dan norma sosial (E15).

Tata kelola kolaboratif dengan Penguatan sinergi melalui kerangka pentahelix merupakan kunci dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan, di mana pemerintah bertindak sebagai penggerak utama (*key player*) yang memiliki kewenangan operasional untuk mengoordinasikan dukungan dari akademisi, pelaku usaha, dan media (Cita *et al.* 2025).

Tahap 4 - Pencapaian *Output* Tata Ruang Ideal (Level 1): Puncak pencapaian adalah terwujudnya zonasi ruang yang tegas (E1) dan penataan aktivitas ekonomi (E10) yang tertib. Implementasi kebijakan yang efektif pada tahap akhir ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Masnur 2024). Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai teologis ke

dalam kerangka manajerial fisik merupakan jalur kebijakan paling viable bagi pelestarian kawasan warisan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ayyubi MS, Arifin HS, Kaswanto RL. 2024. Rekomendasi Strategi Pengelolaan Lanskap Publik Ruang Terbuka Hijau dan Biru di Kota Bogor. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 11(2): 102-112.
- Arifin HS, Munandar A, Arifin NHS, Kaswanto RL. 2009. Potensi Kegiatan Agrowisata di Perdesaan (Buku Seri IV: Manajemen Lanskap Perdesaan bagi Kelestarian dan Kesejahteraan Lingkungan). Bogor: Departemen Pertanian & IPB.
- Azikin A, Fewidarto PD. 2023. Model Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 10(1): 24-33.
- Battour M, Ismail MN. 2016. Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. *Tourism Management Perspectives* 19: 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Casnan C, Purnawan P, Triwahyuni H, Fuadi E. FW, Firmansyah I. 2021. Analisis Kendala Pembelajaran Daring PAUD dan SD dengan Pendekatan Interpretative Structural Modeling. *Jurnal Pelita PAUD* 6(1): 33-40.
- Cita FA, Rahmawati E, Basuni S. 2025. Penguatan Sinergi Pentahelix untuk Mendukung Ekowisata Cenderawasih di Sawendui Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 12(2): 166-173.
- Hapsari P, Nurhayati, Kaswanto RL. 2025. Analisis Potensi Daya Tarik Wisata Lanskap Budaya Jayengan Kampung Permata Surakarta. *Jurnal Lanskap Indonesia* 17(1): 34-42. <https://doi.org/10.29244/jli.v17i1.55465>
- Hasibuan MSR, Nurhayati HSA, Kaswanto RL. 2014. Karakter Lanskap Budaya Rumah Larik di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. *Jurnal Lanskap Indonesia* 6(2): 13-20. <https://doi.org/10.29244/jli.v6i2.16558>
- Ilhami WT, Arifin HS, Pramudya B, Kosmaryandi N. 2024. Sustainable Scientific Tourism Development Planning using Micmac-Mactor in Bogor City, Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 14(4): 757. <https://doi.org/10.29244/jpsl.14.4.757>
- Ilmi MR, Kaswanto RL, Nurhayati HSA. 2022. A Cultural-History Analysis on Malay-Islamic Heritage of Siak Sri Indrapura through the Historical Urban Landscape Approach in Pekanbaru City. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 6(1): 78-90. <http://doi.org/10.30829/juspi.v6i1.12160>
- Lamidi L, Sitorus SRP, Pramudya B, Munibah K. 2018. Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Serang, Provinsi Banten. *Tataloka*, 20(1) 65-74. <https://doi.org/10.14710/tataloka.20.1.65-74>
- Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Jakarta: PT Grasindo.
- Masnur B, Rusdiyanto E, Munawir A. 2024. Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan karena Peningkatan Lahan Terbangun di Kota Pekanbaru. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 11(2): 124-130.
- Mubasyaroh, Maghfirah N, Dewi NR. 2024. Sacred Sites, Sustainable Futures: Community Responses to the Development of Sustainable Religious Tourism in Mount Muria Area. *Qudus International Journal of Islamic Studies* 12(2): 287-332. <https://doi.org/10.21043/qjjis.v12i2.26023>
- Pasaribu YA. 2019. Penataan Ruang dalam Rangka Pelestarian Kawasan Cagar Budaya: Kajian Kota Kuno Banten Lama. *Kalpataru, Majalah Arkeologi* 28(2), 17-32. <https://doi.org/10.24832/kpt.v28i2.51>
- Paulus CA, Yahyah, Al Ayubi A, Azmanajaya E, Firmansyah I. 2022. Policy Design for Coastal and Marine Tourism Development in Komodo National Park Using Interpretative Structural Modelling: A Case Study of Padar and Komodo Islands. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS)*. 11(131): 258–266. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2022-11.26>.
- Pribadi TI, Setiawan MA. 2024. Peran Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah. *Cendekia:*

- Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 1(7): 305-316. <https://doi.org/10.62335/v1i7.345>
- Primadona F, Hartoyo, Yuliati LN, Arsyianti LD. 2025. Determinants of Consumer Loyalty in Halal Tourism Unveiling the Critical Factors Driving Visit Intentions of Muslims and Non-Muslims in Lombok, Indonesia. *Journal of Indonesian Islam* 19(1): 214–238. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2025.19.1.214-238>
- Pusparini FD, Nurhayati, Arifin HS. 2017. Landscape Management of Public Open Space in Bogor Heritage City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 91(1): 1-7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/91/1/012020>
- Rahmafitria F, Kaswanto RL. 2024a. The Role of Eco-attraction in the Intention to Conduct Low-Carbon Actions: A Study of Visitor Behavior in Urban Forests. *International Journal of Tourism Cities* 10(3): 881-904. <https://doi.org/10.1108/IJTC-07-2023-0138>
- Rahmafitria F, Pratama AR, Kaswanto RL, Miller L. 2024b. Tourism Accessibility in A Protected Area: Toward the Psycho-social Approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1366(1): 012016. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1366/1/012016>
- Rindasih E, Izzudin M, Baiquni M. 2022. Kotagede Heritage City: Identification of Conservation and Preservation based on Community Perspective. *Jurnal Pariwisata Pesona* 7(1): 1-9. <https://doi.org/10.26905/jpp.v7i1.7321>
- Sarbini, Tahrir, Endi, Olagoke SM, Gumilar S, Mursidin. 2025. The Character Education Model as a Strategic Framework for Nurturing Religious Moderation within State Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies* 13(1): 1–38. <https://doi.org/10.21043/qijis.v13i1.30618>
- Septian DE, Kaswanto RL, Arifin HS. 2025. Kontribusi Jasa Lanskap Agroforestri sebagai Usaha Peningkatan Resiliensi Ekosistem terhadap Tekanan Lingkungan. *Jurnal Riset Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 12(1): 85-104.
- Suweko SK, Kridarso ER. 2018. Banten Lama Landmark based on Visitors Perception. *International Journal on Livable Space* 3(2): 104–110. <https://doi.org/10.25105/livas.v3i2.3396>
- Wahyuni N, Sihabudin A, Sigit RR. 2023. Model of Communicative Constitution of Organization in the Management of Borobudur Temple. *International Journal of Applied Science and Sustainable Tourism Events* 7(1): 27–36. <https://doi.org/10.31940/ijaste.v7i1.27-36>